

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia dipicu oleh perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Hal ini membuat seluruh aktivitas kegiatan yang dilakukan semakin mudah, murah, dan cepat. Sistem informasi tumbuh sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan berdampak nyata bagi setiap individu maupun organisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Berbagai macam sistem digunakan oleh individu maupun masyarakat untuk mengatur proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, pencarian, dan penyampaian informasi (Gordon dan Gordon, 2004). Hal ini membuat pemerintah Indonesia sadar peranan penting sistem informasi dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*). Sejalan dengan pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi sektor privat, pemerintah Indonesia juga berupaya untuk menyelaraskan pelayanan publik seiring kemajuan teknologi informasi yaitu dengan melalui penerapan layanan elektronik atau biasa disebut sebagai *e-government*. Upaya tersebut diterapkan sebagaimana yang telah diinstruksikan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*.

Penerapan *e-government* di Indonesia terkhusus dalam bidang pengelolaan keuangan negara, diimplementasikan salah satunya dalam bentuk *Integrated Financial Management Information System* (IFMIS). Dengan melalui IFMIS, masalah-masalah yang terjadi akibat penggunaan sistem yang bersifat manual atau sistem yang terpisah dalam pengelolaan anggaran dan proses akuntansi dapat diatasi dengan baik. Masalah tersebut dapat berupa ketidakandalan dan keterlambatan data pendapatan dan belanja dalam perencanaan, pengawasan dan pelaporan anggaran serta pengendalian belanja yang berdampak buruk pada pengelolaan anggaran secara keseluruhan. Perbaikan sistem administrasi dan perubahan melalui pemanfaatan teknologi menjadi suatu tuntutan oleh masyarakat

untuk menerima pelayanan publik atas dasar penerapan efektivitas, efisiensi dan pengurangan biaya dalam digitalisasi pengelolaan keuangan pada sektor publik.

Upaya yang dilakukan untuk memenuhi tuntutan memenuhi tuntutan tersebut, Kementerian Keuangan mengembangkan sebuah sistem aplikasi yang memiliki integritas tinggi dan diperuntukkan bagi seluruh satuan kerja (satker) instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia dengan diberi nama Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI. Sistem SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. Berbeda dengan sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, SAKTI dibangun guna mendukung pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel, terintegritasi dan berbasis kinerja. Sistem ini memiliki fitur utamanya yaitu integrasi basis data, *single entry point*, penerapan akuntansi berbasis akrual dan jaminan keamanan data.

Pengembangan ide SAKTI dibangun dengan melakukan penyederhanaan terhadap aplikasi pengelolaan keuangan negara yang digunakan oleh satker sebelumnya yaitu aplikasi eksisting. Dengan penggunaan aplikasi SAKTI, maka aplikasi yang ada pada satuan kerja akan mengalami perubahan yang signifikan dengan meleburnya berbagai aplikasi eksisting yang digunakan saat ini, seperti Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) untuk penganggaran, Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) untuk penatausahaan aset, Aplikasi Persediaan untuk persediaan, Sistem Aplikasi Satker (SAS) untuk pencairan dana, dan Sistem Informasi Berbasis Akrual (SAIBA) untuk pelaporan yang menjadi satu kesatuan dalam aplikasi tunggal yang terintegrasi yang disebut dengan SAKTI. Aplikasi eksisting tersebut bersifat terpisah (*standalone*) sehingga data yang ada pun juga terpisah, padahal dalam mengoperasikannya data dari setiap aplikasi saling berkaitan. Contohnya aplikasi SAIBA, saat mengoperasikannya membutuhkan data dari

aplikasi RKA-KL, SAS, dan SIMAK-BMN. Selain itu aplikasi SAS dapat dijalankan setelah data pagu hasil penyusunan anggaran RKA-KL selesai diproses. Dalam hal ini, saat pengguna aplikasi melakukan aktivitas seperti pencatatan transaksi keuangan harus melakukan proses *input* data secara berulang pada aplikasi tersebut dan cenderung memungkinkan terjadinya kesalahan.

Penerapan SAKTI yang merupakan wujud inovasi sistem teknologi informasi yang baru dalam pengelolaan keuangan dan anggaran negara tentunya menimbulkan banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam implementasinya. Diperlukan upaya sistematis terkait komunikasi dan pemahaman oleh seluruh satuan kerja Kementerian/Lembaga agar sistem ini dapat diterapkan dengan baik dikarenakan sistem ini secara otomatis menggantikan sistem yang selama ini ada. Sampai dengan saat ini, implementasi penerapan SAKTI pertama kali diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 diawali dengan tahap *piloting*, yang berarti serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengoperasikan SAKTI dengan menggunakan sumber daya manusia, proses bisnis, infrastruktur dan teknologi pada setiap unit yang bisa dipastikan dapat menerapkan atau mengoperasikan SAKTI secara menyeluruh. Dalam tahap *piloting* awal ini terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan stabilitas sistem, kualitas output, teknis penggunaan, hingga layanan dukungan SAKTI. Nasrudin (2017) dalam penelitiannya menyebutkan masih banyak ditemukan beberapa permasalahan terkait dengan fitur aplikasi yang rumit, sinyal internet yang tidak stabil, laporan yang belum bisa ditampilkan dengan utuh, pelatihan teknis yang minim, komunikasi admin dengan operator yang kurang, baik pusat dan daerah serta masalah-masalah lainnya.

Atas hasil temuan beberapa penelitian yang pernah dilakukan, Sauer dan Cuthbertson (2003) menemukan bahwa hanya sekitar 16% proyek IT sektor Inggris yang bisa dinyatakan berhasil, sementara 84% lainnya mengalami kegagalan dalam berbagai tingkatan. Kegagalan tersebut disebabkan oleh unsur *simplicity*, *certainly*, dan *stability* pada system yang kurang memadai serta rendahnya dukungan dan kompetensi dari pihak manajerial organisasi. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan SAKTI menjadi prioritas yang harus

diutamakan dalam inisiatif yang strategis DJPB, Kementerian Keuangan. Dalam pengimplementasiannya masih terdapat kendala dan hambatan, salah satunya terkait dengan penundaan waktu pelaksanaan terkait dengan piloting SAKTI yang melibatkan banyak pihak, baik dari pihak inisiator program inovasi sendiri dalam hal ini DJPB maupun dari pihak yang nantinya akan menggunakan program tersebut. Melihat jangkauan yang sangat luas dan berskala nasional tentunya program SAKTI menghabiskan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran yang sangat banyak. Akan tetapi, pengorbanan yang dikeluarkan kenyataannya belum tentu dapat menjamin keberhasilan implementasi dari program ini. Kegiatan piloting dilakukan seolah hanya melibatkan satu kementerian yaitu dalam lingkungan Kementerian Keuangan saja. Hal ini menjadi sorotan penting bagi pihak inisiator melalui sebuah usaha untuk mendapatkan perhatian yang besar dalam menerapkan program SAKTI tersebut sesuai dengan PMK No.171/PMK.05/2021 yang mengamanatkan tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) : Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Semarang I”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Semarang I?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Semarang (KPPN) I.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. **Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman, serta meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I.

2. **Bagi Instansi**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi satuan kerja KPPN Semarang I sebagai bahan masukan dan evaluasi atas penerapan SAKTI dalam mendukung Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara untuk membangun pengelolaan keuangan yang lebih baik.

3. **Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu, wawasan dan referensi mengenai Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

4. **Bagi Penelitian berikutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan rujukan sumber informasi sehingga dapat dijadikan sumber referensi tambahan dalam penelitian sejenis di masa yang akan datang atau pengembangan penelitian lebih lanjut.